JIAP FIA UB

JIAP Vol 4, No 2, pp 117-121, 2018
© 2018 FIA UB. All right reserved
ISSN 2302-2698
e-ISSN 2503-2887

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)

URL: <http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap>

Perencanaan Pengembangan Usaha Kreatif Tenun Ikat (Studi Usaha Kreatif di Desa Manulondo Kabupaten Ende)

Yakobus Alfonds Rodja^{a *}

^a *Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Indonesia*

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 18 Mei 2018

Revisi pertama tanggal: 22 Mei 2018

Diterima tanggal: 27 Juni 2018

Tersedia online tanggal: 29 Agustus 2018

ABSTRACT

The development planning of creative bind-weaving business (creative business study in Manulondo Village of Ende Regency) aims to improve the welfare and financial revenue of the region which will impact on the increase of local revenue (PAD) of Ende Regency. The focus of this research is based on the planning theory according to Tjokroamidjojo (1995) which defines planning as a thorough and continuous process of activities of planning, implementation, monitoring and evaluation. By using interactive data analysis method, the result of research obtained is that planning of business development of creative sub-sector of bind-weaving has not run optimally. This is due to the lack of clarity of the intentions contained in the public policy and human resources apparatus that has not been adequate

Keywords: planning, creative works, tenun ikat

INTISARI

Perencanaan pengembangan usaha kreatif tenun ikat (studi usaha kreatif di Desa Manulondo Kabupaten Ende) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan penerimaan keuangan daerah yang berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ende. Fokus penelitian ini didasarkan pada teori perencanaan menurut Tjokroamidjojo (1995) yang mendefinisikan perencanaan sebagai proses kegiatan yang menyeluruh dan terus menerus dari penyusunan rencana, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dengan menggunakan metode analisis data interaktif maka hasil penelitian yang diperoleh yaitu perencanaan pengembangan usaha kreatif sub sektor tenun ikat belum berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan kurang jelasnya maksud-maksud yang termuat dalam kebijakan publik serta sumber daya manusia aparatur yang belum memadai.

2018 FIA UB. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Perdebatan mengenai progresifitas pembangunan di daerah tak ubahnya seperti cerita tanpa akhir, terlebih bila dikaitkan dengan aspek kemandirian keuangan daerah. Meminimalisir ketergantungan pendanaan dari

pusat seakan hanya sebatas keinginan tanpa ada upaya lanjut untuk mengupayakan langkah-langkah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membangun dengan mengoptimalkan karakteristik melalui potensi yang ada di daerah. Tenun ikat adalah salah satunya. Suatu industri rumah tangga yang

* Corresponding author. Tel.: +62-821-4544-3860; e-mail: jackyrodja@yahoo.co.id

dominan pada masyarakat di Kabupaten Ende seakan menjadi ciri khas yang terlupakan, sedangkan potensi ekonomis yang bisa didapatkan cukup besar. Seperti halnya yang dialami oleh para pengrajin di Desa Manulondo Kecamatan Ndona Kabupaten Ende.

Gambar 1 Peta Desa Manulondo
Sumber: Athanua, 2015

Sejauh yang diamati kondisi kesejahteraan para penenun didesa tersebut masih sebatas memenuhi kebutuhan lokal khususnya keperluan adat, menggunakan manajemen tradisional, kuantitas produksi sangat minim, dan masih belum optimal. Ketersediaan jejaring usaha melalui keberadaan mitra bisnis, menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Masyarakat masih memasarkan produknya secara swadaya dan pada sisi lain minimnya inovasi menyebabkan belum optimalnya usaha untuk menciptakan produk turunan bersifat produk kreatif berbahan tenun ikat. Kenyataan lainnya adalah kebijakan pengembangan usaha kreatif tenun ikat masih berangkat dari perspektif birokrasi sendiri, dimana hanya terdapat dua aktor yang memainkan peranan penting dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Ende, yaitu eksekutif dan legislatif.

Penelitian mengenai perencanaan pengembangan usaha kreatif sub sektor tenun ikat dilakukan dengan pertimbangan adanya fenomena menarik yang mengakibatkan perkembangan usaha kreatif tenun ikat berjalan kurang optimal. Adapun pertanyaan yang akan dijawab pada penelitian ini adalah a) Bagaimanakah perencanaan pengembangan usaha kreatif tenun ikat di Desa Manulondo Kabupaten Ende?; dan (b) Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam perencanaan pengembangan usaha kreatif tenun ikat di Desa Manulondo Kabupaten Ende?.

2. Teori

2.1 Kebijakan Publik

Jenkins (dalam Wahab, 1997:4) menyatakan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang

saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para kekuasaan dari para aktor tersebut.

Selanjutnya Dye (dalam Dunn, 1994:10) ada tiga elemen kebijakan dalam sistem kebijakan yang dalam penelitian ini dikorelasikan sebagai: (a) Kebijakan publik (RPJMD, RKPD, Renja, dll); (b) Pelaku kebijakan (Birokrasi, Legislatif); dan c) Lingkungan kebijakan (para penenun). Dye mengatakan bahwa (obyektifnya) kebijaksanaan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah jadi bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah adalah termasuk kebijakan negara (kebijakan publik), dikarenakan pengaruh (dampak) yang sama antara “sesuatu yang tidak dilakukan” dan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah.

2.2 Perencanaan

Perencanaan bukan sekedar merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana saja, melainkan dalam pengertian yang luas yaitu perencanaan yang meliputi proses kegiatan yang menyeluruh dan terus menerus dari penyusunan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya Tjokroamidjojo (1995:57) mengemukakan proses atau tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan yang meliputi (a) Penyusunan Rencana; (b) Penyusunan Program Rencana; (c) Pelaksanaan Rencana; (d) Pengawasan; dan (e) Evaluasi.

Perencanaan memiliki peranan penting. Urgensi tersebut dimaknai dalam proses penyusunan perencanaan, terutama dalam menghadapi kondisi ketersediaan sumber daya pembangunan yang terbatas agar dapat digunakan secara optimal. Untuk itu peranan pemerintah menjadi sangat signifikan walaupun tidak harus bersifat dominan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

2.3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Koordinasi merupakan salah satu fungsi organik dari manajemen. Dengan koordinasi yang efektif akan dapat dicapai hasil maksimal dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Stoner & Freeman (1992) secara sederhana mengartikan koordinasi sebagai proses pemaduan sasaran-sasaran dan kegiatan unit-unit yang terpisah. Koordinasi bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang substansi kebijakan untuk menyelesaikan masalah tertentu, menyelesaikan konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya pembangunan. Selain itu koordinasi juga ditujukan untuk

menyinkronkan antara kebijakan dan rencana tindakan pelaksanaan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga atau organisasi sesuai kewenangan yang dimiliki.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Fokus penelitian mengarah pada tahapan-tahapan dalam proses perencanaan menurut Tjokroamidjojo (1995), yakni (a) Penyusunan Rencana; (b) Penyusunan Program Rencana; (c) Pelaksanaan Rencana; (d) Pengawasan; dan (e) Evaluasi.

Data bersumber dari informan dari beberapa kalangan seperti Kepala Desa Manulondo, para pelaku usaha, serta pejabat dari instansi-instansi yang terkait dengan perencanaan pengembangan usaha kreatif tenun ikat. Dokumen dalam penelitian ini berupa RPJMD, RKPD dan Renja OPD. Peristiwa-peristiwa yang dijadikan referensi yaitu proses musrenbang, penyerahan bantuan bahan baku, dan sebagainya.

Analisis data menggunakan metode analisis data interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:12) dengan tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu a) Kondensasi data; (b) Penyajian data; dan (c) Menarik kesimpulan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan fokus penelitian, maka hasil penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

4.1 Penyusunan Rencana

Perumusan kebijakan pengembangan usaha kreatif Desa Manulondo, didasarkan pada tiga pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

- Pertumbuhan usaha;
- Tingkat kesejahteraan; dan
- Pengembangan SDM pengrajin (penenun).

Dalam pelaksanaannya, tidak berjalan sendiri. Terdapat koordinasi yang melibatkan OPD lainnya, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Pariwisata. Masing-masing OPD melaksanakan pengembangan usaha kreatif sesuai dengan program yang ada, dan dalam konteks koordinasi upaya tersebut berupaya meminimalisir resiko miskomunikasi dan tumpang tindih kegiatan diantara OPD yang menjadi pelaksana. Permasalahannya adalah indikator yang dikenakan sebagai ukuran progresifitas perkembangan usaha kreatif menggunakan prosentase, bukan angka riil, sedangkan indikator yang terdapat dalam RPJMD merupakan alat ukur terhadap operasionalisasi kerja di tingkat OPD.

Penggunaan prosentase dalam indikator menjadikan perkembangan usaha kreatif sangat sulit diukur. Kondisi awal dan kondisi akhir yang diharapkan dalam *forecasting* menunjukkan dasar yang kurang jelas tentang

pemahaman terhadap kondisi usaha kreatif. Akibatnya, perumusan program dan kegiatan di tingkat OPD kurang memiliki target dan arah yang jelas, serta merupakan pengulangan terhadap kegiatan-kegiatan sebelumnya dan berdasar pada interpretasi perencanaan sendiri. Kehadiran inovasi terhalang oleh pembatasan yang sempit terhadap jangkauan program dan visi, karena fokus hanya kepada pemberian bantuan dan bimbingan bukan terhadap tahapan atau proses dan aktor. Staf birokrasi dan legislatif tidak melihat pada apa yang ingin dicapai dan efektifitas dari cara-cara yang digunakan.

Dalam pelaksanaannya kebijakan yang dijalankan menumbuhkan sikap ketergantungan yang tidak sehat, yang mengurangi aspek kemandirian dari pelaku usaha. Pemerintah belum bertindak sebagai katalisator yang memprioritaskan penanganan pengembangan usaha kreatif melalui kemitraan dengan stakeholder lainnya supaya menjadi pemerintah yang berjejaring atau menjadi jembatan bagi kepentingan para stakeholder usaha kreatif, sehingga ketiga orientasi tersebut dapat terwujud.

Tabel 1 Perbandingan Lingkungan Kebijakan Menurut Subarsono (2012) dan Kondisi di Lapangan

Lingkungan Kebijakan Menurut Subarsono	Kondisi di lapangan
Sosial ekonomi dan tingkat kemajuan teknologi	Masyarakat Desa Manulondo, terutama pengrajin tenun ikat masih memiliki tingkat kesejahteraan dan latar belakang pendidikan yang rendah. Penggunaan teknologi dalam proses produksi masih menggunakan cara-cara yang tradisional.
Dukungan publik terhadap kebijakan	Masyarakat penenun memiliki antusiasme dan sangat mendukung adanya kebijakan dan pendampingan yang dilakukan dinas Perindag
Sikap dari kelompok pemilih	Masyarakat hanya terlibat sebatas musrenbang, pada tahap pengambilan keputusan keterlibatan masyarakat masih kurang maksimal. Masyarakat tidak dapat melakukan intervensi apalagi mengubah suatu keputusan.
Tingkat komitmen dan ketrampilan aparat sebagai implementatornya	Aparatur sebagai implementor bekerja sebatas pemahaman dan kemampuan yang dimiliki, sehingga kurang menyentuh pada esensi persoalan yang sebenarnya. Terbatasnya tenaga pendamping dilapangan menyebabkan transfer pengetahuan berjalan lambat.

Sumber: Hasil analisis, 2017

4.2 Pelaksanaan Rencana

Tahapan pelaksanaan merupakan interpretasi faktual terhadap penyusunan rencana, secara sederhana dimaknai sebagai melaksanakan apa yang telah direncanakan. Keterpaduan dalam hal koordinasi sangat menentukan bagi pencapaian tujuan. Namun pada pelaksanaannya, koordinasi yang terjalin belum maksimal. Pemanfaatan potensi ekonomis dari pengembangan usaha kreatif bagi peningkatan pendapatan asli daerah belum optimal.

Konsekuensi dari adanya koordinasi adalah keberadaan informasi yang cukup lengkap agar sistem koordinasi berjalan efektif, dan hal tersebut dapat berjalan dalam suatu pola jaringan. Idealnya koordinasi dapat dikembangkan menjadi suatu jaringan antar OPD atau *inter agency network*, dimana komunikasi dan dialog antar OPD dapat diarahkan untuk meningkatkan keserasian, dan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat saling mendukung bagi pencapaian tujuan kebijakan, pemanfaatan sumberdaya keuangan, dan pemecahan konflik kepentingan yang bersifat vertikal, horisontal dan lintas vertikal-horisontal (Munir 2002:168). Namun bila dilihat dari proses pembuatan kebijakannya sendiri serta *output* yang dihasilkan dari koordinasi merupakan gambaran atas eksistensi pola *iron triangle* sebagai suatu bentuk penyederhanaan, bahkan *over simplification* terhadap keputusan-keputusan menyangkut pengembangan usaha kreatif, berbeda dengan pola jaringan yang lebih komprehensif.

4.3 Pengawasan/ Monitoring

Berdasarkan informasi monitoring yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha kreatif baik dari kegiatan pemberian bantuan bahan baku tenun maupun kegiatan bimtek bagi para penenun, lebih banyak bersumber dari catatan administratif dan pelaporan terbatas dari lapangan. Dengan demikian, monitoring pelaksanaan kegiatan dalam rangka mengembangkan usaha kreatif belum memperhatikan prosesnya, apakah cukup partisipatif, koordinatif dan mengoptimalkan kerjasama dengan mitra dan pihak lain yang terkait atau tidak. Keterbatasan tenaga fasilitator yang juga ditugaskan untuk memonitor kegiatan dimaksud serta koordinasi yang belum optimal dengan aparat desa menghambat jalannya proses monitoring.

Monitoring berjalan belum optimal terutama di tingkat kelompok sasaran. Masih belum terdapat kejelasan tentang siapa yang mengontrol jika ada pihak lain yang bertindak tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Seperti ketidakadilan dalam hal distribusi bantuan di tingkat kelompok sasaran. Monitoring di tingkat kelompok sasaran diperlukan agar ketua kelompok dapat memperbaiki kondisi yang kurang baik, terutama menyangkut dua aspek, yaitu *activity based*, seperti

proses menenun, pemberdayaan dan *capacity building*, atau pengembangan kapasitas kelompok sasaran sehingga kinerja pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu, permasalahan yang ada dalam proses pemantauan dapat menjadi umpan balik sebagai masukan untuk perbaikan bagi perencanaan dan kepemimpinan.

4.4 Evaluasi

Dale (2004) menyatakan bahwa kegiatan evaluasi yang dilakukan pihak pertama terhadap hasil dan dampak dari suatu program/ proyek akan sangat membantu para perencana dan pengelola dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka sesuai peran dan bidangnya masing-masing. Pada kenyataannya, proses evaluasi belum memberikan pemahaman yang baik menyangkut persoalan pengembangan usaha kreatif kepada perencana, dikarenakan penggunaan indikator kinerja yang didasarkan pada persentase. Dengan demikian, pengukuran kinerja melalui proses evaluasi sumatif yang sifatnya kuantitatif menjadi tidak akurat. Penggunaan indikator yang kurang tepat menjadi persoalan sendiri, terutama dalam menjawab pertanyaan mendasar seperti; apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan usaha kreatif telah menghasilkan suatu perubahan.

Pada sisi lain proses evaluasi yang dilakukan dalam rangka menilai proses pelaksanaan program tersebut belum berjalan secara optimal, disebabkan oleh keterbatasan tenaga fasilitator yang juga menjadi evaluator di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan perencana dalam organisasi kurang mendapatkan informasi yang akurat terutama menyangkut kondisi eksternal. Melakukan evaluasi terhadap kondisi eksternal terutama di tingkat kelompok sasaran penting, karena berkaitan dengan dampak dari pelaksanaan program. Pengabaian terhadap kondisi eksternal dalam proses evaluasi menimbulkan pemahaman yang tidak komprehensif atas persoalan yang ditangani. Perlibatan faktor eksternal dalam proses evaluasi selain untuk mendapatkan informasi juga mendorong partisipasi dengan mengikutsertakan penilaian dari semua *stakeholder*.

5. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan diatas, antara lain sebagai berikut:

- a) Perencanaan pengembangan usaha kreatif sub sektor tenun ikat sebagai sebuah kebijakan masih didominasi oleh keputusan politik yang terinstitusionalisasi dengan terfokus pada peran aktor sentral seperti bupati, legislator dan birokrat. Lemahnya pendekatan teknokratis oleh aparat

birokrasi menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak mengarah pada penyelesaian masalah seperti penciptaan ekosistem usaha termasuk pasar potensial, dan investasi; dan

- b) Koordinasi antar agensi belum terintegrasi sehingga efektifitas pengembangan usaha kreatif sub sektor tenun ikat menjadi terhambat. Koordinasi sebagai upaya komunikatif menjadi terabaikan. Hal tersebut disebabkan adanya ego sektoral antar OPD.

Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan, yaitu sebagai berikut:

- a) Belum meingkatnya kualitas kebijakan publik; yang disebabkan karena kebijakan publik yang dihasilkan belum melibatkan aktor-aktor yang terkait, sebagai bentuk keterhubungan dengan publik yang berpengaruh terhadap kualitas dari kebijakan yang dihasilkan; dan
- b) Masih minimnya SDM aparatur perencana yang kompeten untuk menempati jabatan sebagai perencana dalam OPD terkait, sehingga perencanaan pengembangan usaha kreatif dapat menjadi lebih terarah.

Daftar Pustaka

- Athanua. (2015). *Peta Desa Manulondo Kecamatan Ndona*. Tersedia pada <http://athanua.blogspot.com/2015/10/profil-desa-manulondo-kecamatan-ndona.html> [Diakses pada 09 November 2017].
- Dale, Reidar. (2004). *Evaluating Development Programmes and Projects, Second Edition*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Dunn, William N. (1994). *Public Policy Analysis: an Introduction*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Miles, Huberman dan Saldana. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Munir, Badrul. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. BAPPEDA Propinsi NTB, Mataram.
- Subarsono, AG. (2012). *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi, Cetakan ke IV*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stoner, James A.F., & R. Edward Freeman. (1992). *Management (Fourth Edition)*. Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs, NJ.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1995). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Wahab, Solichin Abdul. (1997). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang: IKIP Malang.